BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Libya saat Revolusi

4.1.1 Kronologi Revolusi Libya

Pemberontakan rakyat Libya sebenarnya telah lama terdengar, pada Oktober tahun 1993, Khadafi pernah diserang dan hampir dibunuh, insiden ini diduga dilakukan oleh kelompok politik penentang Khadafi, seperti: Konferensi Nasional Oposisi Libya, Front Nasional untuk Keselamatan Libya, dan Komite Aksi Nasional Libya di Eropa. Bahkan, di tahun 2006, pemberontakan terhadap Khadafi juga sempat timbul sebagai unjuk rasa atas digantungnya seorang mahasiswa aktivis HAM dan demokrasi di Libya. Namun, tidak lama setelah insiden tersebut, gejolak kembali reda. Tindakan otoriter Khadafi dianggap sebagai hal yang lumrah dalam menjalani kehidupan di Libya, sampai pada akhirnya, mata rakyat Libya kembali terbuka setelah melihat revolusi yang dialami negara-negara tetangga Libya.

Khadafi barangkali menyadari bahwa revolusi yang terjadi dikawasan Timur Tengah bisa saja melanda negaranya. Pencegahan dilakukan dengan pemblokiran *social network* dengan tujuan membatasi pengetahuan rakyat Libya dari berita-berita luar untuk mencegah kemungkinan terjadi hal yang serupa di Libya. Namun, aksi Khadafi memblokir jaringan sosial adalah awal dari terjadinya demontrasi. Pada malam hari tanggal 15 Februari 2011, sekitar 200 orang mulai berdemontrasi di depan markas polisi di Benghazi menyusul penangkapan aktivis

HAM Fathi Terbil yang diduga sebagai orator utama demonstrasi. Para demostran kian bertambah hingga mencapai hampir 600 orang. Protes atas pemblokiran *facebook* ini menyebabkan kekerasan oleh polisi, sebanyak 40 oang luka-luka di antara pengunjuk rasa.

Khadafi terus memaksa para tentara meredam unjuk rasa yang terjadi. BBC melaporkan pada 23 Februari 2011 bahwa selama seminggu sebelumnya (13-19 Februari) telah terjadi pertempuran antara demonstran dan loyalis pemerintah sehingga Benghazi jatuh ke tangan oposisi. Dan korban jiwa dilaporkan mencapai 300 orang dari demonstran dan 120 anggota pasukan pemerintah. Bertambahnya jumlah demonstran, membuat pemerintah Libya mulai memperkerjakan tentara bayaran, hal tersebut semakin memicu konflik hingga pada tanggal 19 Februari 2011, salah seorang saksi melaporkan bahwa helikopter pro-khadafi menembak kerumunan anti-pemerintah.

Pada tanggal 21 Februari di Benghazi, pengunjuk rasa mengambil alih jalan-jalan dan menjarah senjata dari markas besar utama pemerintah. Para pengunjuk rasa juga menurunkan bendera Libya dari atas gedung pengadilan utama dan mengganti dengan bendera tua monarki pada saat Raja Idris I memimpin negara itu. Pesawat tempur angkatan udara Libya dan helikopter melakukan serangan udara kearah demonstran, dengan target arakan-arakan prosesi pemakaman, namun kemudian sekelompok demonstran mencoba untuk merebut sebuah pangkalan militer. Dua pilot senior angkatan udara F1 *Mirage Dassault* terbang ke Malta untuk minta suaka politik setelah menetang pemerintah Khadafi untuk membom pengunjuk rasa (Tamburaka, 2011: 227-229).

4.1.2 Terbentuknya *National Transitional Council* (NTC)

Menanggapi demonstrasi pertama yang terjadi di Libya, maka tanggal 24 Februari 2011, para politisi, mantan perwira militer, pemimpin suku, akademisi dan pengusaha mengadakan pertemuan di kota timur Bayda. Pertemuan tersebut dipimpin oleh mantan menteri kehakiman Mustafa Abdul Jalil yang berhenti dari jabatannya beberapa hari sebelum pemerintah Libya di landa krisis. Para delegasi membahas proposal untuk pemerintahan sementara dan banyak delegasi menginginkan pembahasan intervensi PBB di Libya. Dalam pertemuan tersebut kemudian disepakati untuk membentuk pemerintahan sementara Libya, *National Transitional Council* atau Dewan Transisi Nasional Libya, yaitu pemerintah *de facto* Libya yang didirikan oleh pasukan anti-Khadafi selama perang sipil Libya. Kelompok ini adalah penentang yang mengadu kekuatan melawan pemerintah Kolonel Muammar al-Khadafi. NTC mengeluarkan Deklarasi Konstitusi pada bulan Agustus 2011 di mana ia mendirikan sebuah peta untuk transisi negara ke demokrasi konstitusional dengan pemerintahan terpilih (Tamburaka, 2011: 237).

Pembentukan NTC yang memiliki badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif diumumkan di kota Benghazi pada 27 Februari 2011 dengan tujuan untuk bertindak sebagai "wajah revolusi politik". Pada tanggal 5 Maret 2011, dewan mengeluarkan pernyataan berupa deklarasi diri untuk menjadi "hanya tubuh yang sah mewakili rakyat Libya dan negara Libya". Dewan eksekutif, dipimpin oleh Mahmoud Jibril, dibentuk oleh dewan pada tanggal 23 Maret 2011 setelah menjadi *de facto* dirakit sebagai "tim eksekutif" sejak 5 Maret 2011. NTC telah mendapat pengakuan internasional sebagai otoritas pemerintahan yang sah di

Libya dan menempati kursi negara Libya di PBB sampai otoritas interim terpilih. Beberapa negara lain telah membentuk hubungan resmi dengan Dewan Transisi Nasional dan telah membangun hubungan diplomatik permanen di Benghazi untuk bekerja sama dengan para pejabat dewan. Dewan ini juga telah menerima dukungan dari Liga Arab dan Uni Eropa. Pada tanggal 16 September 2011, Majelis Umum PBB memberi kursi Libya di PBB untuk NTC. Pada tanggal 20 September 2011, Uni Afrika resmi mengakui NTC sebagai perwakilan yang sah dari Libya

Namun, pembentukan NTC tidak disetujui oleh sebagian rakyat Libya. Rakyat Libya tidak senang dengan rezim baru Libya karena dianggap tidak dapat membangun Libya, bahkan setelah NTC dibentuk, Amerika Serikat melalui NATO mengirimkan sekitar 12.000 pasukan ke Libya dengan dalih "mengamankan Libya", dan NTC membiarkan para tentara itu masuk ke Libya. Padahal, kedatangan pasukan tersebut ke Libya hanya akan menambah kerusakan di Libya.

Adapun secara deskriptif, peneliti mencoba mengambarkan kondisi di mana saat revolusi akan berlangsung diawali oleh protes damai muslim Libya yang kemudian sering berubah menjadi kekerasan akibat tindakan rezim Khadafi yang mengirim pasukan bersenjata untuk melawan milisi anti-Khadafi dengan alasan untuk memadamkan demonstrasi sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Mohamed Benrasali, seorang juru bicara dewan kota Misrata menyatakan bahwa orang-orang Libya telah mengidentifikasi NTC sebagai akar permasalahan di Libya, karena kurangnya transparansi dewan pemerintahan sementara tersebut

terhadap warga Libya (http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advicebycountry/country-profile/middle-east-northafrica/Libya/?profile=geography, diakses pada tanggal 24 Mei 2012).

4.4.3 Kehadiran NATO di Libya

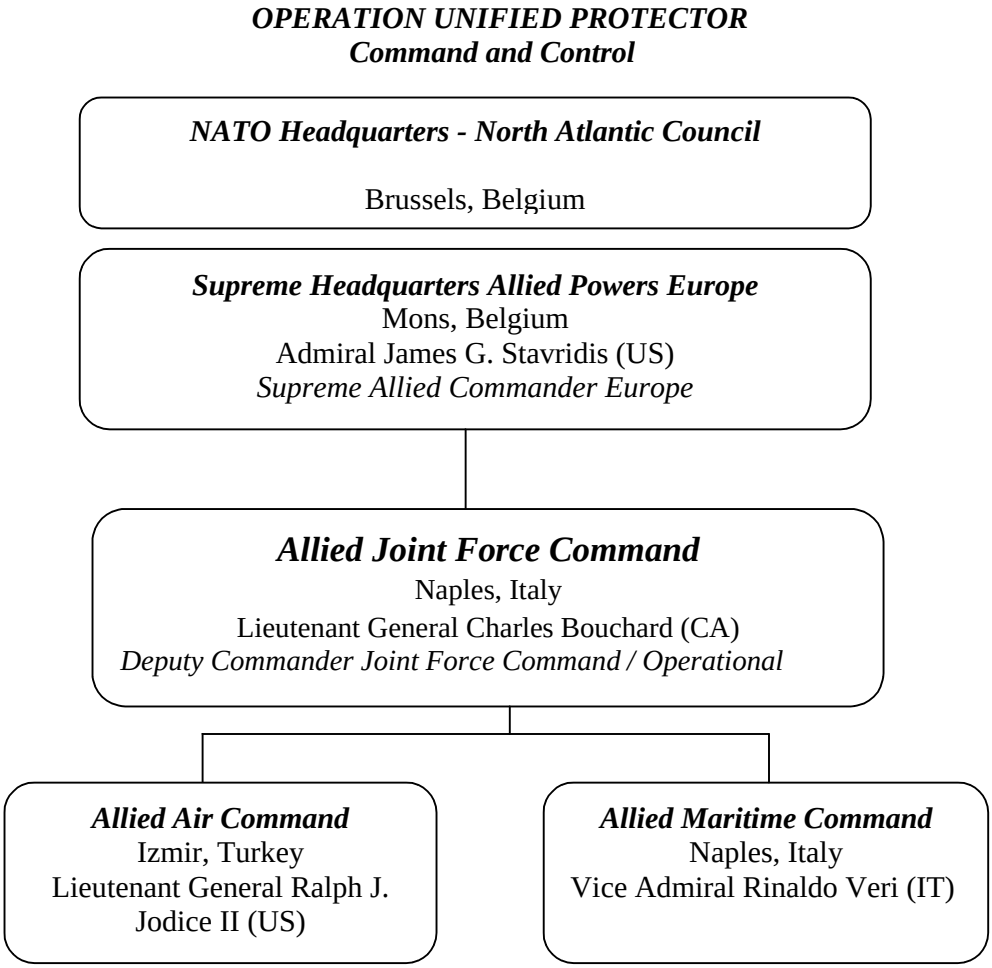
Sebagai organisasi internasional terbesar di dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan untuk mengeluarkan mandat terkait konflik di Libya. PBB kemudian membentuk sebuah badan, yaitu *United Nation Support Mission in Libya* (UNSMIL) yang bekerja fokus untuk terlibat dalam menyelesaikan konflik Libya. Pada tanggal 29 Maret 2011, PBB mengadakan konferensi di London untuk membahas kondisi Libya yang semenjak demonstrasi pertama semakin bertambah buruk. Peserta konferensi yang terdiri dari negara-negara Uni Eropa dan organisasi internasional *regional* Timur Tengah dan internasional menegaskan pentingnya implementasi penuh dan cepat dalam menetapkan *United Nation Security Council Resolution* (UNSCRs) 1970 dan 1973 yang menegaskan kembali komitmen mereka yang kuat terhadap kedaulatan, kemerdekaan, integritas teritorial dan kesatuan nasional Libya. Para peserta sepakat untuk menegakkan larangan dan sanksi terhadap rezim Khadafi dan bertindak untuk mencegah pasokan dan operasi tentara bayaran, serta menegaskan kembali dukungan mereka untuk tindakan melalui pembuatan kontribusi yang efektif dan berkelanjutan untuk operasi militer sampai tujuan masyarakat internasional dapat tercapai.

Operasi bertujuan untuk menggunakan kekuatan militer didukung oleh peningkatan upaya politik dengan menciptakan suatu Kelompok Kontak internasional di Libya atau *Libyan Contact Group*. Konferensi London tersebut dihadiri lebih dari 40 Menteri Luar Negeri dan perwakilan dari organisasi-organisasi internasional dan *regional*, termasuk NATO, untuk memberi tekanan politik terhadap rezim Khadafi. Sekretaris Jenderal NATO mengatakan bahwa penciptaan Kelompok Kontak internasional di Libya sebagai ekspresi yang kuat dari dukungan komunitas internasional untuk membantu rakyat Libya dalam mencapai kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia.

Peserta dalam konferensi tersebut, termasuk negara-negara regional, menyambut kontribusi dan mempersilahkan NATO untuk mengambil perintah dan kontrol dari semua operasi militer untuk menegakkan embargo senjata, larangan zona terbang, dan tindakan lainnya yang diperlukan, seperti yang berwenang dalam UNSCR 1973 (2011), untuk melindungi warga sipil Libya. Sementara operasi lain diluar operasi militer, seperti pembekuan aset Khadafi dan keluarganya, menyatakan pelarangan bepergian dari Libya bagi Khadafi dan keluarganya, menyiapkan pertolongan kemanusian, serta berkomitmen untuk terus menindaklanjuti sampai konflik di Libya selesai adalah tetap menjadi tugas UNSMIL yang juga bertindak dibawah mandat PBB (http://www.nato.int/natostatic/assets/pdf/pdf2011/10/20111005111005-factsheetprotectioncivilians.pdf, diakses pada tanggal 17 Agusutus 2012 pukul 14.00 WIB).

4.2 Misi NATO dalam mengatasi konflik di Libya

Kehadiran NATO di Libya adalah bentuk kerjasama dari operasi serangan sekutu yang telah disepakati oleh NATO dan negara-negara yang ikut berpartisipasi dalam menangani konflik di Libya, dimana operasi tersebut adalah mandat dari piagam ke tujuh PBB yang disepakati dibawah *United Nation Support Mission in Libya* (UNSMIL). Di bawah ini adalah bagan dari Operasi Serangan Sekutu;



Terdapat 17 negara yang bergabung dalam operasi serangan sekutu, diantaranya: Belgia, Bulgaria, Kanada, Denmark, Perancis, Yunani, Italy, Belanda, Norwagya, Qatar, Romania, Spanyol, Swedia, Turki, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, dan Inggris (http://www.nato.int/cps/en/SID3EE2F3D6 9C69FEF9/*natolive*/topics_71652.htm?selectedLocale=en, diakses pada tanggal 9 Februari 2012).

Dalam operasi tersebut, NATO disepakati untuk mengambil alih kendali operasi yang bersifat militer untuk menangani konflik Libya di bawah Resolusi Keamanan PBB 1970 & 1973 pada Maret 2011. Operasi Serangan Sekutu terdiri dari tiga unsur, yaitu:

1. Embargo senjata yang dimulai pada tanggal 23 Maret 2011.

Sejak tanggal 23 Maret 2011, NATO melalui *Operation Unified Protector* telah menegakkan embargo senjata terhadap Libya sebagaimana diamanatkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1970 dan 1973. Embargo ini bertujuan untuk mencegah pasokan senjata dan tentara bayaran ke dan dari Libya, yang dilakukan di laut, di udara, dan juga di lepas pantai Mediterania Libya. Menegakkan embargo senjata berarti beroperasi di perairan internasional di lepas pantai sepanjang 1100 mil (1.770 kilometer), di daerah dengan aktivitas komersial yang tinggi. Hal ini berarti menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke kota yang terkepung di Misrata dan kota-kota lainnya di Libya.

Dengan penggunaan teknologi dalam pengumpulan intelijen yang canggih, terutama melalui *Airborne Early Warning and Control Aircraft* (AWACS) NATO

adalah kunci untuk mengidentifikasi kapal. Melakukan pendekatan koordinasi dengan industri perkapalan dan juga dengan komunitas kemanusiaan untuk memastikan bahwa kedua pelayaran komersial dan kemanusiaan dapat dilakukan dengan menimalisir atau tidak berdampak sama sekali dalam konflik Libya. Langkah-langkah ini juga membantu mendeteksi kapal yang tidak sah, yang mungkin memiliki niat untuk melanggar embargo yang telah ditetapkan oleh PBB (http://www.nato.int/cps/en/SID67F8A474FCDA6F47/natolive/natocountries.htm ,di akses pada tanggal 26 Mei 2012).

2. Zona larangan terbang yang dimulai pada tanggal 25 Maret 2011.

NATO mengumumkan akan memberlakukan zona larangan terbang pada tanggal 24 Maret 2011. Sebagai bagian dari operasi serangan sekutu, NATO mengerahkan kapal angkatan laut dan pesawat pengintai, termasuk AWACS NATO, memberikan *real-time monitoring* dan koordinasi aktivitas udara di atas wilayah udara Libya. NATO juga bertanggung jawab untuk mendeteksi setiap pesawat yang memasuki zona larangan terbang tanpa izin sebelumnya. Pesawat tempur NATO siap untuk mencegat setiap pesawat yang melanggar zona larangan terbang dan untuk melibatkan mereka jika mereka dinggap memberikan ancaman.

Menurut NATO, dalam menegakkan zona larangan terbang, kekuatan hanya akan digunakan sebagai pilihan terakhir. Seperti standar dalam operasi militer, pejuang NATO memiliki hak untuk membela diri terhadap serangan dari udara atau darat. NATO mengumumkan secara aktif bahwa organisasi ini sangat mempertimbangkan untuk mengambil alih mandat PBB dalam pemberlakuan larangan zona terban terhadap Libya.

Pada tanggal 25 Maret 2011, kekhawatiran mulai merebak atas keputusan NATO untuk mendirikan pusat komando ganda. Komandan AS tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerbangan pelindung NATO tidak bertentangan dengan misi tempur yang direncanakan di bawah Komando AS.

Aliansi mengumumkan pada tanggal 27 Maret 2011 akan mengambil peran lebih luas dalam melindungi warga sipil Libya. Dan pada tanggal 31 Maret 2011, NATO kemudian mengumumkan akan mengambil alih semua operasi di wilayah Libya. Pada titik ini, Komando Sekutu di bawah pimpinan Laksamana Stravridis di Belgia melancarkan Operasi Serangan Sekutu sebagai aktor yang bertanggung jawab dalam upaya internasional untuk menegakkan Resolusi 1970 dan 1973. Semua kegiatan militer dipimpin dari Naples oleh Jenderal Charles Bouchard (http://www.nato.int/cps/en/SID-0CE62BD0B1EBA6C7/natolive/topics_71652.htm?selectedLocale=en, diakses pada tanggal 22 Juli 2012 pukul 13.25 waktu malaysia).

3. Perlindungan warga sipil Libya yang dimulai pada tanggal 31 Maret 2011.

Setelah situasi di Libya yang semakin mengkhawatirkan, Dewan Keamanan PBB menerapkan langkah lebih lanjut untuk mengadopsi Resolusi 1973 pada 17 Maret 2011. Resolusi tersebut mengutuk "pelanggaran berat dan sistematis hak asasi manusia, termasuk penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penyiksaan dan eksekusi". Resolusi ini juga memperkenalkan langkah-langkah aktif, termasuk sebelumnya meberlakukan larangan zona terbang, dan negara anggota yang berwenang, bertindak sesuai mandat melalui organisasi regional

untuk menggunakan "semua langkah yang diperlukan" dalam melindungi warga sipil Libya dan daerah-daerah berpenduduk sipil.

Aliansi mengambil komando tunggal dan pengendalian upaya militer internasional untuk Libya pada 31 Maret 2011. Aset udara dan aset laut NATO mulai mengambil tindakan militer untuk melindungi warga sipil dan daerah-daerah berpenduduk sipil. Sepanjang krisis, Aliansi berkonsultasi erat dengan PBB, Liga Arab dan mitra internasional lainnya (http://www.nato.int/nato _static/assets/pdf/pdf_2011_09/20110902_110902-oup-update.pdf, diakses pada tanggal 22 Juli 2012 pada pukul 13.25 Waktu Malaysia).

4.3 Kendala NATO Dalam Menjalankan Misi di Libya

Politik internasional yang terjadi di Libya dipengaruhi oleh pertumbuhan isu-isu ideologi, peningkatan kerusakan akibat perang, dan kebangkitan nasionalisme rakyat dalam hubungan luar negeri. Salah satu perkembangan dengan konsekuensi yang sama besarnya terhadap struktur dan proses politik internasional. Ini adalah kepentingan politik yang mendasari perselisihan Amerika Serikat melalui NATO dengan pemerintahan Libya dibawah Rezim Muammar al-Khadafi yang sebelumnya terjadi dis-integrasi di dalam negara Libya sendiri.

Menurut laporan dari *Al-jazeera*, Khadafi telah mengajukan pertemuan dengan parlemen Libya untuk menyetujui periode pengalihan kekuasaan guna membuka jalan bagi Khadafi untuk turun dari kursi kepresidenan Libya. Khadafi akan menyampaikan pengajuan penyerahan jabatan dengan syarat diberikan kekebalan hukum terhadap gugatan pidana serta tidak dilucuti dari kekayaan. Namun,

menurut NTC, mereka menolak tawaran tersebut karena khawatir akan memicu kemurkaan para korban rezim Khadafi. Khadafi dilaporkan telah mengirim Jadallah Azzouz Talhi, mantan perdana menteri untuk menyusun kesepakatan yang dapat disetujui kedua pihak. Proposal Khadafi mencakup usulan penyerahan kekuasaan ke komite yang dibentuk oleh kongres.

Sumber yang dekat dengan NTC menyebutkan, suatu rumusan sedang disusun untuk memungkinkan Khadafi menyerahkan jabatan ke ketua parlemen serta meninggalkan Libya dengan diizinkan mengantungi sejumlah uang. Namun, salah satu pejabat humas dewan membantah hal tersebut. Ketua dewan nasional Libya, Mustafa Abdul jalel menyatakan tidak akan mengejar pemimpin Libya Muammar Khadafi atas sejumlah kejahatan yang pernah dilakukan asalkan jika dia mundur dari jabatannya sejak tenggat waktu 72 Jam dari tanggal 7 Maret 2011 dan tidak lebih dari waktu yang telah ditentukan. Adapun jaminan yang diberikan adalah pelepasan atas tuntutan dalam negeri atas kasus kejahatan penindasan, kemiskinan, penganiayaan, dan pembantaian.

Di lain pihak Khadafi juga membantah dengan tegas bahwa ada perundingan untuk mengeluarkan dirinya dan keluarganya dari Libya. Cerita yang saling bertentangan ini tidak dapat dipastikan kebenarannya. Pemimpin Libya yang diperangi, Muammar Khadafi, mengatakan kepada para pendukungnya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan tanah nenek moyangnya dan mereka yang telah mengorbankan hidup untuknya.

Pernyataan baru Khadafi ini datang setelah NTC diakui sebagai otoritas yang sah dari negara oleh perwakilan negara-negara yang terlibat dalam perang yang

dipimpin oleh negara-negara anggota NATO di Libya. Lebih dari 30 negara menghadiri Kelompok Kontak Libya di Istanbul, Turki, pada Juni lalu dan mereka sepakat untuk mengakui *National Transitional Council* (NTC)/Dewan Transisi Nasional sebagai pemerintahan sementara Libya.

Hal tersebut tentu menjadi kendala NATO dalam mengatasi konflik di Libya. Khadafi diduga mengeluarkan banyak uang untuk megirim tentara dari luar guna mendukung pertahanan yang dia miliki. Bahkan menurut NTC, Khadafi telah menculik rakyat Libya dan membiarkan mereka dengan kondisi yang tidak manusiawi. Menurut pernyataan NTC yang dikeluarkan pada tanggal 06 April 2011, lebih dari 20.000 orang telah di culik oleh orang-orang suruhan Khadafi dari rumah, jalanan ataupun kantor mereka. Khadafi kemudian meletakkan mereka didalam penjara tanpa pakaian ganti dan hanya tidur di lantai yang sangat dingin, bahkan tawanan tersebut hanya diberi 2 buah roti serta sebotol air setiap 24 jam sekali. Hal tersebut dilakukan Khadafi karena dia meyakini bahwa rakyat Libya tersebut telah ikut berpartisipasi dalam demo yang telah terjadi di Libya dan penentangan atas rezim Khadafi di media sosial seperti *facebook* (http://www.ntclibya.org/english/urgent-press-release/, diakses pada 29 April 2011, pukul 03:34).

4.4 Upaya NATO Dalam Menjatuhkan Rezim Muammar al-Khadafi

Misi-misi yang dijalankan oleh NATO ternyata tidak membuat Khadafi gentar untuk melakukan perlawanan. Khadafi tidak menyerah begitu saja ketika negara-negara lain bersatu untuk menjatuhkannya. Sikap Khadafi ini menimbulkan

kesulitan tersendiri bagi organisasi internasional seperti NATO, khususnya bagi dana operasional selama menjalankan misi di Libya. Dalam menjalankan misi-misi tersebut, dana yang dibutuhkan tentu tidak sedikit, dan hal ini yang kemudian menjadi upaya tersendiri bagi NATO dalam memenejemen dana yang didapat dari negara-negara sekutu.

Peneliti mencermati bagaimana biaya keuangan untuk menjalankan misi ini diemban dan dibebankan kepada setiap negara. Setiap negara yang terlibat dalam operasi NATO berkontribusi membayar biaya yang digunakan dari penggunaan yang dikerahkan sebagai bagian dari Operasi Serangan Sekutu. Sementara itu, didapatkan rincian mengenai total biaya penyebaran *Airborne Early Warning and Control Aircraft* (AWACS) NATO diperkirakan mencapai 5,4 juta Euro/bulan. Selain itu, biaya komplementer untuk argumentasi struktural dan personil dikantor pusat yang terlibat dalam Operasi Serangan Sekutu diperkirakan mencapai 800.000 Euro/bulan, sesuai dengan verifikasi akhir oleh otoritas keuangan NATO. Dana tersebut dikeluarkan untuk menjalankan misi-misi yang sudah disepakati oleh NATO dan negara-negara yang terlibat. Berikut adalah misi, aktifitas, dan bentuk-bentuk senjata yang dipakai NATO selama menjalankan operasi sebagai bentuk upaya dalam menjatuhkan rezim Muammar al-Khadafi;

4.4.1 *Arms Embargo*/Embargo Senjata

Embargo senjata adalah misi yang pertama kali diterapkan oleh NATO sebagai bentuk kerja dalam mengatasi konflik di Libya pada tanggal 23 Maret 2011. Misi ini dijalankan dengan menempatkan kapal perang dan pesawat NATO untuk

berpatroli di pendekatan teritorial perairan Libya sebagai bagian dari Operasi Serangan Sekutu. Misi ini dijalankan untuk mencegah aliran senjata, bahan-bahan pembuatan senjata dan tentara bayaran masuk ke Libya. Mandat Operasi Serangan Sekutu tersebut diberikan berdasarkan Bab Tujuh Piagam PBB dalam resolusi 1970, 1973 dan 2009 berkaitan dengan misi NATO. UNSCRs 1970 dan 1973 yang berwewenang dalam pengambilan keputusan menyatakan bahwa "*perlu langkah-langkah*" untuk mencegah aliran senjata, bahan terkait dan tentara bayaran ke Libya. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari kontribusi NATO dalam upaya internasional yang luas untuk melindungi warga sipil di Libya dari kekerasan yang dilakukan oleh rezim Khadafi.

Komando dan Pengendalian dalam operasi ini secara keseluruhan diperintahkan dari Kanada oleh Letnan Jenderal Charles Bouchard dari Satuan Tugas Gabungan Operasi Serangan Sekutu. Embargo Senjata Maritim berada di bawah komando Wakil Italia Laksamana Rinaldo Veri dari NATO *Maritim Command Naples*. Komandan Satuan Tugas di laut dari Italia, Laksamana Filippo Maria Foffi. Terdapat dua belas negara yang berpartisipasi dalam misi ini, yaitu; Belgia, Bulgaria, Kanada, Perancis, Yunani, Italia, Belanda, Spanyol, Rumania, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut telah menyediakan aset angkatan laut untuk menegakkan embargo, didukung oleh patroli pesawat maritim.

Kemampuan militer yang terlibat dalam misi ini termasuk kapal pasokan, frigat, kapal perusak, kapal selam, kapal serbu amfibi (juga disebut arahan dermaga platform) dan kapal induk. Pada puncaknya, 21 aset angkatan laut

diberikan kepada NATO sebagai bentuk dukungan operasi. Dan pada tanggal 29 September 2011, sepuluh negara kembali memberikan dua belas aset angkatan laut untuk misi embargo senjata tersebut. Sesuai dengan prosesnya, kapal bertujuan untuk transit melalui wilayah embargo diharuskan memberi tahu NATO tentang seluruh isi kargo dan tujuan kedatangan sebagaimana tercantum dalam pesan akan peringatan navigasi.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh kapal transit, termasuk melalui Sistem Otomatis Identifikasi Kapal (yang berisi informasi dasar tentang kecepatan, posisi, dan tujuan), serta sarana pengawasan dan intelijen, NATO melakukan kegiatan dengan memverifikasi aktivitas pelayaran di wilayah ini dan memisahkan daerah-daerah komersial, lalu lintas kemanusiaan dan swasta dari kapal yang mencurigakan dan menjamin pemeriksaan lebih dekat. Kapal mencurigakan yang diidentifikasi melalui radio, akan dihadang untuk kemudian dilakukan proses pemeriksaan di mana jika mereka tidak dapat memberikan informasi yang memuaskan tentang kargo mereka, kapal NATO berwenang untuk mencegat, dan sebagai usaha terakhir, tim dari NATO diberi wewenang untuk menggunakan kekerasan agar mendapatkan akses ke kapal dan dapat memeriksa log kapal, daftar kru dan memanifestasi isi kargo. NATO memastikan bahwa selama menjalankan misi embargo, semua *boardings* telah terlindungi. Jika senjata, tentara bayaran, atau bahan terkait ditemukan atau jika ada alasan untuk percaya bahwa kapal atau muatannya akan digunakan untuk mendukung serangan terhadap warga sipil, baik secara langsung maupun tidak langsung, kapal dan awaknya dapat ditolak haknya untuk melanjutkan ke tujuan mereka. Sampai pada

tanggal 30 September 2011, sebanyak 2.862 kapal telah datang dan 293 diizinkan untuk masuk. Sebelas kapal telah ditolak untuk melanjutkan perjalanan karena oleh NATO dianggap membahayakan bagi warga sipil Libya (http://www.nato.int/cps/en/SID7135F7A548856AEA/natolive/topics_71652.htm ?, diakses pada tanggal 26 Januari 2012).

NATO mengatakan bahwa dalam konflik yang terjadi, keselamatan jiwa manusia merupakan tanggung jawab NATO dan negara-negara yang terlibat, di mana semua unit maritim NATO menyadari sepenuhnya tanggung jawab mereka berkaitan dengan *International Maritime Law regarding Safety of Life at Sea* (SOLAS). Menurut NATO, Kapal NATO akan melakukan segala cara untuk menanggapi panggilan penderitaan dan memberikan bantuan bila diperlukan, hal tersebut mereka lakukan pada sejumlah peristiwa selama operasi. Secara total, kapal NATO membantu langsung untuk menyelamatkan lebih dari 600 orang dalam kesulitan di laut. Melalui koordinasi dengan nasional berwenang dan penjaga pantai, NATO telah memfasilitasi penyelamatan ratusan korban.

Politik pengawasan operasi ini disediakan oleh Dewan Atlantik Utara. Kapal Satuan Tugas dan pesawat akan tetap berada di perairan internasional dan tidak akan memasuki wilayah perairan Libya. Sementara NATO tidak dapat memblokir semua rute ke negara itu, namun, NATO telah memotong rute tercepat, dan termudah untuk sampai ke Libya. Kapal NATO akan menggunakan *surveilans* untuk memverifikasi aktivitas pelayaran di kawasan tersebut, memisahkan komersial yang sah dan lalu lintas dari kapal swasta yang mencurigakan untuk menjamin pemeriksaan lebih dekat.

Jika senjata atau tentara bayaran ditemukan, kapal dan awaknya akan diantar ke *port* yang aman di mana internasional dan otoritas nasional akan mengambil alih dalam pengusutan hal tersebut. Pesawat dapat dicegat dan diantar ke bandara yang ditunjuk oleh NATO. Pada saat yang sama, NATO bekerja sama dengan Organisasi Maritim Internasional untuk memastikan bahwa aliran pelayaran komersial dan swasta yang sah dapat masuk ke Libya tanpa hambatan.

4.4.2 *No Fly Zone*/Larangan Zona Terbang

Dalam Operasi Serangan Sekutu, perlindungan rakyat sipil dan wilayah berpopulasi sipil serta penegakan *No-Fly Zone* menjadi pembahasan inti sebagai bentuk sebuah gerakan. Misi ini dicetuskan pada tanggal 25 Maret 2011, NATO mengambil komando operasi militer internasional atas Libya. Tujuan dari tindakan NATO adalah untuk melindungi warga sipil dan daerah dengan populasi sipil dari serangan atau ancaman serangan. Misi ini dilengkapi dengan aksi *No-Fly-Zone* yang menutup wilayah udara Libya untuk semua penerbangan kecuali dengan tujuan kemanusiaan yang dapat mencegah pesawat apapun untuk menyerang warga sipil.

Pada tanggal 21 September 2011, NATO dan negara mitra telah sepakat untuk memperpanjang kedua elemen dari misi ini sampai 90 hari mulai 28 September 2011. Mandat ini diberikan menurut Bab Tujuh Piagam PBB. Dewan Keamanan PBB Resolusi 1970, 1973 dan 2009 berkaitan dengan misi NATO. UNSCR 1973 mengamanatkan "semua langkah yang diperlukan" untuk melindungi

warga sipil dan populasi wilayah sipil di bawah serangan atau ancaman serangan di Libya.

Operasi *No fly zone* diperintahkan oleh Letnan Jenderal Charles Bouchard dari *combined joint task force* Operasi Serangan Sekutu. Operasi udara dikelola dari Markas NATO *Air Command Headquarters for Southern Europe*, di Izmir, Turki. Kontrol taktis *real-time* dilaksanakan oleh Operasi Gabungan NATO *Air Centre* (CAOC) di Poggio Renatico, Italia Utara. Operasi Angkatan Laut untuk mendukung misi yang diarahkan dari NATO *Maritim Command Naples*.

Pada 26 September 2011, enam belas negara bersedia memberikan bantuan aset udara dan serangan mendadak yang ditinggalkan dalam mendukung operasi ini, diantaranya Belgia, Kanada, Denmark, Perancis, Yunani, Italia, Yordania, Belanda, Norwegia, Qatar, Spanyol, Swedia, Turki, Uni Emirat Arab, Inggris dan Amerika. Upaya ini dilengkapi dengan AWACS milik NATO untuk pengawasan dan pesawat pengintai.

Kemampuan militer yang terlibat dalam operasi ini termasuk pesawat tempur, pengawasan dan pesawat pengintai, *air to air refuellers*, *unmanned aerial vehicle* (UAV)/kendaraan udara tak berawak, dan helikopter serang. Pada puncaknya, lebih dari 260 aset udara berkontribusi pada operasi ini. Seperti pada 20 September 2011, sekitar 8.000 tentara ditugaskan untuk NATO untuk mendukung berjalannya misi *no fly zone*.

Tindakan ini sejalan dengan UNSCR 1973, NATO melakukan operasi pengintaian, pengawasan dan pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang menghadirkan ancaman bagi warga sipil. Aset udara

NATO kemudian dapat terlibat untuk target di darat, laut atau di udara. Kapal dan kapal selam kepolisian untuk embargo senjata berkontribusi pada misi berdasarkan kasus per kasus. Target dari operasi yang dijalankan oleh NATO sendiri telah menghancurkan lebih dari 5.900 sasaran militer termasuk lebih dari 400 peluncur roket artileri atau dan lebih dari 600 tank atau kendaraan lapis baja yang diduga sebagai basis kekuatan Khadafi. NATO juga telah menyerang lebih dari 400 pusat komando dan kontrol militer untuk menghentikan kemampuan rezim Khadhafi dalam memberikan perintah kepada pasukannya. Target ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan presisi dalam penggunaan senjata dan meminimalisir bentuk kerugian agar menghindari kerugian bagi rakyat Libya dan infrastruktur mereka (http://www.nato.int/cps/en/SID-0CE62BD0B1EBA6C7/natolive/topics_71652.htm?selectedLocale=en, diakses pada tanggal 22 Juli 2012 pukul 13.25 waktu malaysia).

4.4.3 *Protect Civilians from Attack or Threat of Attack*

Pada tanggal 31 Maret 2011, NATO mengambil komando operasi militer internasional atas Libya di bawah Serikat Dewan Keamanan PBB dengan resolusi 1970 dan 1973. Tujuan dari tindakan NATO adalah untuk melindungi warga sipil dan daerah dengan populasi sipil dari serangan atau ancaman serangan. Misi ini melengkapi misi NATO sebelumnya, yaitu *No fly zone* yang menutup wilayah udara Libya untuk semua penerbangan kecuali kemanusiaan yang dengan demikian mencegah pesawat apapun dari menyerang warga sipil. Pada tanggal 1

Juni 2011, NATO dan negara mitra telah sepakat untuk memperpanjang aspek ini sebagai misi selama 90 hari mulai 27 Juni 2011.

Kemampuan militer yang terlibat dalam operasi ini termasuk pesawat tempur, pengawasan dan pesawat pengintai, *air to air refuellers*, pesawat udara tak berawak dan helikopter serang. Pada tanggal 31 Mei 2011, NATO dan negara mitra telah mengirim 9.000 serangan mendadak, termasuk lebih dari 3.400 serangan mendadak yang mogok. Target tergantung pada keputusan komandan operasional. Target sasaran termasuk tank, kendaraan lapis baja pengangkut personel, sistem pertahanan udara dan artileri di sekitar dan mendekati daerah-daerah sipil utama termasuk Misrata, Ajdabiyah dan Zintan. Di Tripoli, dalam penargetan, NATO membuat setiap usaha untuk mencegah kerusakan pada populasi sipil dan selalu berpedoman pada prinsip menggunakan kekuatan minimum yang diperlukan.

NATO melakukan semua yang bisa untuk memfasilitasi pengiriman bantuan. Seperti ditunjukkan di kota Misrata di mana pasukan pro-Khadafi ditempatkan didaerah tambang dekat dengan pelabuhan, kapal NATO melakukan patroli di daerah tersebut untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat mencapai warga sipil yang membutuhkan bantuan. NATO tidak memiliki pasukan di lapangan, secara penuh sesuai dengan Resolusi DK PBB 1973 yang melarang setiap ketentuan asing pendudukan berlaku di Libya**.**

Sebagai bentuk penyelamatan terhadap warga sipil, selanjutnya NATO menjelaskan bahwa ada koordinasi rapat dengan para organisasi lain seperti *The International Organization for Migration* (IOM), UNHCR dan *The International*

Maritime Organization (IMO), selama menjalan operasi untuk memastikan adanya pertukaran informasi antara para organisasi. Kapal-kapal milik NATO telah menyelamatkan sekitar 600 warga Libya di Laut Miditerania selama operasi dan dengan tidak langsung, hal tersebut memfasilitasi para migran yang berjumlah ribuan lainnya yang rata-rata di ungsikan sementara ke Tunisa, Itali, malta serta kebeberapa negara tetangga lainnya. *Assistant Secretary General NATO for Operations* Stephen Evans menekankan pada loyalitas bagi para pemimpin komando NATO untuk tetap bertanggungjawab dibawah hukum internasional dan hukum laut (i018 CFC Med Basin Review INFOCUS (26-Jun-12), di unduh pada tanggal 18 Agusutus 2012 pukul 14.00 WIB).

4.4.4 Perpanjangan Misi NATO di Libya

Dalam pertemuan di Berlin pada 14 April 2011, menteri luar negeri dari sekutu NATO dan mitra non-NATO sepakat terhadap tiga hal, yaitu; melanjutkan OUP sampai semua serangan terhadap penduduk sipil dan daerah-daerah berpenduduk sipil berakhir, melanjutkan OUP sampai rezim Khadafi menarik semua pasukan militer dan para-militer ke pangkalan-pangkalan, dan melanjutukan OUP sampai rezim Khadafi mengizinkan NATO untuk mendapatkan akses langsung, lengkap, aman dan tanpa hambatan untuk bantuan kemanusiaan bagi rakyat Libya.

Pada tanggal 8 Juni 2011, menteri pertahanan NATO bertemu di Brussels dan kemudian menyetujui untuk menjaga tekanan terhadap rezim Khadafi selama hal tersebut dibutuhkan untuk mengakhiri krisis, pernyataan ini menegaskan kembali tujuan yang ditetapkan oleh menteri luar negeri.

Setelah pembebasan Tripoli pada tanggal 22 Agustus oleh pasukan oposisi, Sekretaris Jenderal NATO menegaskan komitmen kedua NATO untuk melindungi rakyat Libya dan keinginan internasional yang ingin melihat rakyat Libya dapat memutuskan masa depan mereka dalam kebebasan dan damai. Seluruh kepala negara dan pemerintahan menegaskan kembali komitmen ini dalam pertemuan "*Friends of Libya*" di Paris pada tanggal 1 September 2011. Pada tanggal 16 September, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2009 yang secara bulat menegaskan kembali mandat NATO untuk melindungi warga sipil di Libya.

Perpanjangan misi-misi NATO melalui rapat dengan berbagai negara dan organisasi internasional adalah sebagai bentuk upaya NATO dan negara-negara sekutu untuk terus terlibat dalam kasus Libya. “Keikhlasan” NTC atas kehadiran NATO kemudian juga memuluskan organisasi ini menjalankan misi-misi di Libya yang sama sekali tidak mendapatkan penolakan dari pemerintah sementara Libya tersebut (http://www.nato.int/cps/en/SID7135F7A548856AEA/natolive/topics_71652.htm?, diakses pada tanggal 26 Juni 2012 pukul 20.30 WIB).

4.5 Analisa Upaya NATO dalam Menjatuhkan Rezim Muammar al-Khadafi

Sebagai organisasi internasional, NATO menyatakan bahwa mereka menjalankan misi-misi di Libya dengan sebaik-baiknya di bantu oleh para negara sekutu yang terlibat. Seperti pasukan menyerang udara NATO yang membantu secara bertahap dalam mempersempit kemampuan rezim Khadafi, maka menteri pertahanan NATO bertemu di Brussels pada tanggal 6 Oktober untuk membahas

prospek berakhirnya OUP. Menteri menegaskan komitmen mereka untuk melindungi rakyat Libya yang bertahan selama ancaman, tetapi untuk mengakhiri misi, mereka akan mengakhiri misi jika kondisi di Libya memang benar-benar dalam kondisi aman. Para Sekretaris Jenderal NATO juga berjanji untuk mengkoordinasikan penghentian operasi dengan PBB dan pemerintahan transisi Libya.

Sehari setelah pasukan oposisi ditangkap oleh kubu rezim Khadhafi di Sirte dan disusul oleh kematian Kolonel Khadafi pada tanggal 20 Oktober 2011, Dewan Atlantik Utara mengambil keputusan awal untuk mengakhiri OUP pada akhir bulan Oktober. Selama periode transisi, NATO terus memantau situasi tersebut dan mempertahankan kapasitas untuk merespon ancaman terhadap warga sipil. Dewan Atlantik Utara menegaskan keputusan untuk mengakhiri OUP. Sebuah AWACS NATO meluncurkan tembakan tanpa amunisi terakhir sebagai tanda berakhirnya misi di Libya setelah 222 hari operasi tersebut dimulai. Hari berikutnya, aset maritime NATO meninggalkan perairan Libya untuk kembali ke *port* mereka.

Misi ini berakhir pada tanggal 31 Oktober 2011 pukul 23.59 setempat waktu Libya. OUP dijalankan atas dasar hukum dari Bab ke-Tujuh Piagam PBB. Dewan Keamanan PBB bertindak atas Resolusi 1970, 1973 dan 2009 yang secara langsung berhubungan dengan misi NATO. Pengiriman pasukan militer mencapai sekitar 8.000 pasukan. Ditaksir lebih dari 260 operasi udara, termasuk pesawat tempur, pengawasan dan pesawat pengintai, udara-ke-udara, kendaraan udara tak berawak dan helikopter serang. 21 angkatan laut (pasukan kapal, frigat, kapal

perusak, kapal selam, kapal serbu amfibi dan kapal induk (http://www.nato.int/cps/en/natolive/71679.htm, diakses pada tanggal 26 Juni 2012 pukul 20.30 WIB).

Rangkaian misi-misi yang dijalankan oleh NATO selama kurang lebih 7 bulan akhirnya dapat menjatuhkan rezim Khadafi. Misi-misi ini kemudian dinilai sangat efektif oleh peneliti karena dapat menyempitkan kekuasaan dan tindakan Khadafi sampai rezim ini jatuh pada Oktober 2011. Perjuangan Khadafi yang berhadapan dengan milisi anti-Khadafi serta kekuatan NATO yang disokong oleh negara-negara besar terbukti menyulitkan pergerakan Khadafi untuk tetap bertahan sebagai presiden Libya. Perjuangan Khadafi tersebut semakin berat ketika tidak ada bantuan dari negara ataupun organisasi internasional lain yang bersedia membantu mempertahankan rezim Khadafi, sekalipun negara-negara yang tidak setuju dengan tindakan NATO di Libya, negara-negara tersebut hanya menyampaikan keberatan terhadap PBB atas tindakan NATO, namun tidak melakukan tindakan yang signifikan sebagai bentuk penolakan.

Menurut NATO, selama menjalankan operasi, aliansi sudah meluncurkan 25,944 serangan udara (satu misi satu pesawat), dimana 17,939 (sekitar 70 persen) berisi amunisi. Lebih dari 9,700 adalah serangan mogok, walaupun tidak semua berisi amunisi. Total, NATO mengatakan telah memakai 7,642 *air-to-surface weapons.* Termasuk 3,644 ledakan laser samaran, 2844 ledakan GPS laser, dan 1,150 sasaran langsung kearah senjata api. Diantara beberapa senjata, 82 persen mempunyai berat sekitar 500 sampai 1000 pounds, dan sepuluh persen berada diantara 100 sampai 2000 pounds. Menurut keterangan NATO, serangan tersebut

merusak lebih dari 5,900 target militer, termasuk 400 artileri atau peluncur roket dan lebih 600 tank kendaraan militer (*Operation Unified Protector, Final Mission Stats*, November 2, 2011, http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_11/20111108_111107-factsheet_up_factsfigures_en.pdf, diakses pada tanggal 26 April 2012).

Misi-misi NATO di Libya kemudian menjadi sorotan internasional, terlebih misi yang menjanjikan penyelamatan warga sipil dan daerah berpopulasi warga sipil turut mengundang kontroversi dari berbagai pihak, termasuk organisasi internasional *Human Right Watch* (HRW). NATO yang menyatakan bahwa tujuan utama untuk ikut terlibat dalam konflik Libya adalah untuk melindungi rakyat sipil Libya dari kekejaman rezim Khadafi, namun, pernyataan tersebut tidak sejalan dengan kenyataan yang ada. HRW mengamati jumlah korban yang menjadi sasaran salah tembak NATO di Libya. Misi untuk melindungi penduduk sipil dari serangan atau dari ancaman serangan terbukti dilanggar oleh NATO.

Menurut *Human Rights Watch* dalam laporannya yang berjudul *Unacknowledged Deaths Civilian Casualties in NATO's Air Campaign in Libya*, selama menjalankan misi, NATO sering melepaskan tembakan atau menjatuhkan bom ditempat yang terdapat penduduk sipil yang kemudian menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Korban jiwa yang tidak terlibat selama konflik Libya ini menjadi sasaran senjata-senjata NATO yang mendarat di atas pemukiman mereka. NATO yang menjanjikan keselamatan atas mereka namun melanggar hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab NATO. Berikut ini adalah laporan investigasi HRW terhadap NATO pada bulan Juni sampai dengan September;

4.1 Investigasi Serangan Udara NATO Oleh *Human Rights Watch*

Tripoli	Sebuah serangan udara menghancurkan rumah keluarga al-Gherari pada 19 Juni 2011, dan menewaskan 5 orang. NATO mengakui bahwa itu adalah "*weapons system failure*."
Sorman	Serangan udara bertubi-tubi menghantam secara keseluruhan tembok perkebunan milik keluarga el-Hamedi, pada 20 Juni 2011. Serangan ini menewaskan 8 anggota keluarga dan 5 orang staf perkebunan.
Zliten	Pada tanggal 4 Agustus 2011, sebuah serangan udara menghancurkan rumah Mustafa al-Morabit, serangan tersebut menewaskan istri dan dua orang anaknya. Serangan bertubi-tubi juga menghancurkan keluarga Gafez dan al-Jarud pada 8 Agustus 2011 yang menewaskan 34 orang serta melukai 30 orang.
Majer	Serangan udara menghancurkan 2 rumah milik keluarga Jfara pada malam hari tanggal 29 Agustus dan keesokan pagi hari tanggal 30 Agustus 2011 yang menewaskan 5 orang anggota keluarga, termasuk seorang anak yang berumur 9 tahun.
Bani walid	Serangan udara berkali-kali menghancurkan sebuah gedung apartemen seven-story Imarat al-Tameen pada 16 September 2011. Beberapa bangunan rusak dan

	menewaskan 2 orang.
Al-gurdabiya	Sebuah serangan udara menghancurkan rumah keluarga Gidwar pada tanggal 23 September 2011 yang menewaskan 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan dan melukai sekitar 4 orang lainnya.
Sirte	Sebuah serangan udara menghancurkan rumah keluarga Dyab pada tanggal 25 September 2011 yang menewaskan 3 orang perempuan dan Brig. Gen. Musbah Dyab.

(Laporan *Human Right Watch*, 2012: 8)

NATO dalam hal ini tidak pernah melakukan konfirmasi terkait tindakan salah sasaran dari serangan mereka yang pada mulanya berniat untuk menghancurkan pertahanan-pertahanan Khadafi. Laporan dari saudara-saudara korban yang diterima HRW, salah satunya dari pemboman di Bani Walid, yaitu, Faiz Fathi Jfara, pada 23 January 2012, mengatakan "Saya hanya membutuhkan jawaban dari NATO; Mengapa NATO menghancurkan rumah dan membunuh keluarga saya?" kekecewaan ini adalah satu dari ratusan suara kekecewaan lainnya. HRW mengeluarkan bukti-bukti bahwa aliansi militer NATO tidak memberikan laporan tepat tentang jumlah korban sipil selama serangannya melawan rezim diktator Libya Muammar al-Khadafi.

HRW menilai NATO tidak jujur dalam memberikan laporan tentang jumlah korban dan kerusakan yang disebabkan oleh serangan udaranya. Ketidakjujuran ini membuat HRW terus mendesak NATO untuk memberikan kompensasi kepada

para korban sipil dan memulai penyelidikan atas tewasnya warga sipil dalam serangan udara. Meski demikian, NATO mengelak dari tuduhan tersebut dengan mengemukakan dalih bahwa diperlukan kehati-hatian yang sangat ekstra yang belum pernah terjadi sebelumnya guna "meminimalkan risiko terhadap warga sipil", namun, pasukan NATO tidak berada di Libya untuk mengkonfirmasi jumlah korban. Menurut HRW yang mengadakan pertemuan di Tripoli, Libya, pada tanggal 4 Agustus 2011, *National Libyan Committee for Human Rights* melaporkan bahwa NATO telah membunuh 1,108 warga sipil dan melukai 6,362 jiwa, dari korban luka-luka tersebut, 717 mengalami kondisi krisis dan 4,537 luka ringan. Namun, angka-angka tersebut belum bisa dipastika kebenarannya, hal itu dikarenakan ketika HRW meminta rincian tentang tempat, tanggal kejadian atau nama korban, pihak komite tidak bisa memberikan laporan secara terperinci (Laporan *Human Right Watch*, 2012: 26).

Pada tanggal 3 November 2011, NATO tidak mengakui bahwa telah ada korban jiwa akibat serangan udara yang dilakukan NATO, namun, setelah *New York Times* memaparkan bukti-bukti, juru bicara NATO kemudian memberikan konfimasi bahwa setelah kehati-hatian yang dilakukan oleh NATO, mungkin ada korban jiwa yang tewas atau terluka akibat serangan tersebut. Namun, pernyataan ini tanpa tindak lanjut oleh NATO (Laporan *Human Right Watch,* 2012: 28)

Tindakan tidak bertanggung jawab NATO ini menimbulkan pernyataan bahwa keikutsertaan NATO di Libya hanya ingin mempersempit gerakan Khadafi sampai mantan presiden Libya ini benar-benar turun dari jabatannya. Sehingga, misi-misi yang dilakukan oleh NATO yang tujuan utamanya adalah melindungi

rakyat sipil Libya hanya sebuah kamuflase agar NATO dapat membombardir semua lokasi yang dianggap sebagai benteng pertahanan Khadafi tanpa memastikan target dengan teliti terlebih dahulu guna meminimalisir korban jiwa. Dengan menghancurkan benteng-benteng pertahanan Khadafi, maka secara langsung akan mempersempit perlawanan Khadafi hingga mantan presiden Libya tersebut menyerah dan tewas ditangan para pemberontak pada tanggal 20 Oktober 2011.

4.6 Situasi dan Kondisi Politik Libya Pasca Jatuhnya Rezim Muammar al-Khadafi

Jatuhnya rezim Khadafi disambut gembira oleh para milisi anti Khadafi, hal tersebut terlihat dengan dikibarkannya bendera revolusi oleh para milisi anti-Khadafi setelah mengetahui bahwa rezim tersebut telah jatuh dan Libya akan menjalani sebuah fase baru sebagai sebuah negara. Namun, pasca kematian diktator tersebut, kericuhan masih sering terjadi di Libya. Perang antar dua kubu, yaitu, milisi anti Khadafi dan pro-Khadafi yang tetap ingin mempertahankan pendapat masing-masing kelompok tidak dapat di elakkan begitu saja. Masing-masing kelompok tidak mau menyerahkan senjata yang mereka dapat selama konflik karena satu dengan yang lain takut untuk diserang ketika mereka sudah menyerahkan senjata tersebut. Hal ini tentu menyebabkan konflik masih sering memanas yang berujung pada jatuhnya korban jiwa.

Gambaran lain dari kejadian revolusi warga Libya adalah dengan terdapatnya sekitar 200 warga Libya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011, sebulan

setelah kematian Khadafi. Rakyat Libya berkumpul di kota timur Benghazi -salah satu kota yang menjadi titik awal penentangan diktator Muammar al-Khadafi- untuk menentang Dewan Transisi Nasional (NTC) dan kepalanya, Mustafa Abdul Jalil. Para demonstran terlihat geram dan meneriakkan sejumlah slogan melawan Abdul Jalil dan menyatakan bahwa NTC tidak transparan dalam menjalankan pemerintahan.

Pemilihan umum untuk menggantikan pemerintahan sementara Libya juga dihadapkan dengan banyak kendala, karena yang merasa memperjuangkan kemerdekaan Khadafi mulai menuntut hak mereka agar suara mereka didengarkan oleh NTC. Ratusan bahkan mungkin ribuan Muslim Libya turun ke alun-alun lapangan pembebasan Benghazi untuk menuntut penerapan Syari'at Islam di negara Mediteranian Afrika Utara itu.

Sebagaimana yang dilaporkan *presstv* pada hari Jum'at (8/6/2012), sejumlah konvoi kendaraan kaum Muslimin dengan membawa senjata dan bendera-bendera Tauhid memenuhi jalanan dan menjadi pusat perhatian. Seperti dikutip dari referensi peneliti bahwa;

> “Mereka meneriakkan "Rakyat menginginkan Negara Islam," "rakyat menginginkan Syari'ah," "Allahu Akbar!" sambil melakukan parade militer, para demonstran bertekad akan melindungi kesucian Syari'ah meski dengan mengorbankan hidup mereka. Para penolong Syari'ah bertekad untuk memperjuangkan hukum Allah dan terutama untuk membebaskan Palestina.
> "Kami adalah bangsa Islam, kami harus menegakkan Syari'at Islam, terkhusus untuk membebaskan Palestina," kata seorang demonstran mewakili Muslim lainnya (http://blogs.aljazeera.com/blog/africa/can-libyas-ntc-secure-country, diakses pada tanggal 17 Agusutus 2012 pukul 08.15 WIB).

Demonstrasi ini mungkin akan membuka revolusi kedua bagi Libya, mengingat sejak revolusi pertama dimulai, Libya masih belum menerapkan syari'at Islam secara total. Selain itu demonstrasi ini mungkin akan mengusik pemerintahan yang berkuasa sementara yang sebagian besar adalah teknokratis sekuler dan juga akan mengecewakan kekuatan Barat yang ingin mendudukkan pemerintahan bonekanya di Libya setelah jatuhnya rezim Muammar al-Khadafi.

Kelompok Jihad di Libya yang memiliki peran utama dalam menjatuhkan rezim Khadafi meyakini bahwa revolusi pertama adalah bagian dari *Jihad fii sabiilillah* melawan musuh-musuh Allah dan akan terus dilanjutkan hingga syari'at islam benar-benar tegak secara total di seluruh bagian tanah kaum Muslimin itu. Beberapa media termasuk media Barat melaporkan bahwa ribuan kaum Muslim Libya mengadakan demonstrasi di Tripoli pada Jumat (20/1/2012), menuntut negara untuk menegakkan hukum-hukum syaria't Islam sebagai kerangka hukum yang legal di negara itu. Menurut penyelenggara demonstrasi, tindakan ini merupakan tanggapan terhadap munculnya partai-partai politik sekuler di dalam negeri setelah jatuhnya kediktatoran Muammar Khadafi. Umat muslim berkumpul di bawah panji-panji politik Islam dan kelompok-kelompok Islam, yang kebanyakan para pemuda, para pria berjanggut dengan salinan Al Qur'an di tangan mereka, melakukan demonstrasi dalam mendukung syari'at islam di semua wilayah utama di ibukota Tripoli, di kota Benghazi timur dan Sabha, kota utama di gurun selatan.

Sedangkan di wilayah Aljazair, umat Islam secara publik menghancurkan apa yang disebut "*Green book* atau buku hijau" diktator Muammar Khadafi yang

digunakan sebagai acuan berpolitik, ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian para pengunjuk rasa menunjukkan bahwa Al Qur'an harus menjadi sumber utama undang-undang negara. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan sementara Libya atau pemerintahan yang akan terpilih setelah pemilu di Libya untuk menghindari konflik di kemudian hari (http://www.aljazeera.com/news/africa/2012/08/201282315624361319.html, diakses pada tanggal 17 Agusutus 2012 pukul 08.15 WIB).